

Tantangan Administrasi Kurikulum dalam Implementasi Pembelajaran Merdeka

Hanifah Istiqamah Putri^{1*}

¹ Departemen Sendratasik, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 29 Januari 2026

Direvisi pada tanggal 7 Maret 2026

Diterima pada tanggal 20 April 2026

Terbit online pada tanggal 30 Juli 2026

Kata kunci:

Administrasi Kurikulum, Pembelajaran Merdeka, Manajemen Pendidikan, Sekolah



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan administrasi kurikulum dalam implementasi Pembelajaran Merdeka di satuan pendidikan. Pembelajaran Merdeka menuntut perubahan mendasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang berdampak langsung pada sistem administrasi sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi terhadap pengelola sekolah dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama administrasi kurikulum meliputi keterbatasan pemahaman tenaga pendidik terhadap kebijakan Pembelajaran Merdeka, beban administrasi yang meningkat, ketidaksiapan perangkat administrasi kurikulum, serta keterbatasan dukungan sistem dan pelatihan. Selain itu, adaptasi terhadap perangkat ajar yang fleksibel dan berbasis kebutuhan peserta didik memerlukan penyesuaian administrasi yang tidak sederhana. Pembahasan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan administrasi, serta dukungan manajerial sekolah menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Pembelajaran Merdeka sangat dipengaruhi oleh efektivitas administrasi kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebijakan pendidikan.

Penulis Korespondensi:

Hanifah Istiqamah Putri

Email: hnfhistqmhptr@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia melalui implementasi Pembelajaran Merdeka merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan, potensi, dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran Merdeka memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan pendidik dalam merancang proses pembelajaran yang lebih kontekstual, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Fleksibilitas tersebut menuntut adanya perubahan tidak hanya pada proses pembelajaran, tetapi juga pada sistem administrasi kurikulum yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, administrasi kurikulum memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi Pembelajaran Merdeka dapat berlangsung secara efektif, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Kemendikbudristek, 2022).

Administrasi kurikulum merupakan bagian integral dari manajemen pendidikan yang berfungsi mengoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kurikulum, mulai dari penyusunan program pembelajaran, pengembangan perangkat ajar, pelaksanaan pembelajaran, asesmen, hingga evaluasi hasil belajar. Menurut Hamalik (2018), administrasi kurikulum merupakan proses pengelolaan seluruh komponen kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapat tersebut, Sukmadinata (2020) menyatakan bahwa pengelolaan kurikulum yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan

masyarakat, serta perubahan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, administrasi kurikulum tidak lagi dipandang sebagai kegiatan administratif semata, melainkan sebagai instrumen manajerial yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran.

Implementasi Pembelajaran Merdeka membawa konsekuensi terhadap perubahan pola kerja guru dan pengelola sekolah dalam melaksanakan administrasi kurikulum. Guru dituntut mampu menyusun modul ajar, merancang pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan asesmen diagnostik dan formatif, serta mendokumentasikan perkembangan belajar peserta didik secara lebih komprehensif. Di sisi lain, sekolah juga harus menyesuaikan sistem administrasi yang mendukung pengelolaan dokumen kurikulum, supervisi akademik, pelaporan hasil belajar, serta koordinasi antarpendidik. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan berbagai tantangan, terutama pada sekolah yang masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, maupun pemahaman terhadap kebijakan Pembelajaran Merdeka.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum baru tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pembelajaran, tetapi juga oleh kesiapan sistem administrasi sekolah. Keterbatasan kompetensi guru dalam memahami perubahan kebijakan, meningkatnya beban administrasi, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas implementasi Pembelajaran Merdeka. Apabila tantangan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka tujuan Pembelajaran Merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang fleksibel, bermakna, dan berpusat pada peserta didik akan sulit diwujudkan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi Pembelajaran Merdeka, sebagian besar kajian lebih berfokus pada strategi pembelajaran, kompetensi guru, maupun hasil belajar peserta didik. Penelitian yang secara khusus mengkaji tantangan administrasi kurikulum sebagai faktor pendukung keberhasilan implementasi Pembelajaran Merdeka masih relatif terbatas. Padahal, administrasi kurikulum merupakan aspek fundamental yang menentukan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian mengenai tantangan administrasi kurikulum menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dihadapi sekolah sekaligus menawarkan alternatif solusi dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan administrasi kurikulum dalam implementasi Pembelajaran Merdeka, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan administrasi kurikulum, serta mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk memperkuat sistem administrasi dalam mendukung keberhasilan implementasi Pembelajaran Merdeka. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis terhadap pengembangan kajian administrasi pendidikan serta menjadi referensi praktis bagi kepala sekolah, guru, dan pengelola pendidikan dalam membangun sistem administrasi kurikulum yang adaptif terhadap perubahan kebijakan pendidikan.

2. KAJIAN TEORI

Administrasi Kurikulum

Administrasi kurikulum merupakan salah satu komponen utama dalam administrasi pendidikan yang berperan dalam mengelola seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi kurikulum tidak hanya berkaitan dengan penyusunan dokumen pembelajaran, tetapi juga mencakup pengorganisasian sumber daya, koordinasi pelaksanaan pembelajaran, supervisi akademik, serta pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Menurut Hamalik (2018), administrasi kurikulum merupakan proses pengelolaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum agar mampu menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Sementara itu, Sukmadinata (2020) menjelaskan bahwa administrasi kurikulum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika kebijakan pendidikan sehingga pelaksanaan kurikulum tetap relevan dengan tuntutan zaman.

Administrasi kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman dalam mengoordinasikan berbagai aktivitas pendidikan di sekolah, mulai dari penyusunan kalender akademik, pengembangan perangkat ajar, pengelolaan asesmen, hingga evaluasi hasil belajar peserta didik. Pengelolaan administrasi kurikulum yang baik akan membantu sekolah menciptakan proses pembelajaran yang terstruktur, terukur, serta mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan. Sebaliknya, administrasi kurikulum yang tidak dikelola secara optimal dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran serta menyulitkan sekolah dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan pendidikan.

Pembelajaran Merdeka

Pembelajaran Merdeka merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk merancang proses belajar sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi peserta didik. Kebijakan ini menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered learning), pembelajaran berdiferensiasi, penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, serta penggunaan asesmen sebagai bagian dari proses pembelajaran. Berdasarkan Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek (2022), implementasi Pembelajaran Merdeka bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan bermakna sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sesuai minat dan potensinya.

Dalam implementasinya, Pembelajaran Merdeka membawa perubahan terhadap sistem administrasi kurikulum di sekolah. Guru tidak hanya menyusun perangkat pembelajaran, tetapi juga dituntut mengembangkan modul ajar, melakukan asesmen diagnostik dan formatif, mendokumentasikan perkembangan belajar peserta didik, serta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Pembelajaran Merdeka sangat dipengaruhi oleh kesiapan administrasi kurikulum yang mampu mendukung seluruh proses tersebut secara efektif.

Tantangan Administrasi Kurikulum dalam Implementasi Pembelajaran Merdeka

Perubahan kebijakan kurikulum selalu diikuti oleh berbagai tantangan administratif yang harus dihadapi oleh sekolah maupun tenaga pendidik. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep dan implementasi Pembelajaran Merdeka. Perubahan perangkat pembelajaran, sistem asesmen, serta penyusunan dokumen administrasi memerlukan kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga guru membutuhkan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Menurut Mulyasa (2021), keberhasilan implementasi kurikulum sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan kepemimpinan sekolah, serta efektivitas sistem administrasi yang diterapkan.

Selain faktor sumber daya manusia, tantangan juga muncul dari meningkatnya beban administrasi guru. Penyusunan modul ajar, dokumentasi asesmen, pelaporan capaian pembelajaran, serta berbagai dokumen pendukung lainnya sering kali menambah beban kerja guru apabila belum didukung oleh sistem administrasi yang sederhana dan terintegrasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penyederhanaan administrasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi kerja guru sekaligus memberikan lebih banyak waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Peran Administrasi Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Administrasi kurikulum yang efektif memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan karena menjadi dasar bagi sekolah dalam mengelola seluruh kegiatan akademik secara sistematis. Administrasi yang tertata dengan baik memungkinkan proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan asesmen, supervisi akademik, serta evaluasi pembelajaran berjalan secara terpadu. Selain itu, administrasi kurikulum juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data sehingga sekolah mampu melakukan perbaikan program pembelajaran secara berkelanjutan.

Dalam konteks Pembelajaran Merdeka, administrasi kurikulum berfungsi sebagai instrumen yang memastikan seluruh kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara konsisten di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah perlu membangun sistem administrasi yang adaptif, memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen pembelajaran, serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan demikian, administrasi kurikulum tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi Pembelajaran Merdeka dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

3. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai berbagai tantangan administrasi kurikulum dalam implementasi Pembelajaran Merdeka di satuan pendidikan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap fenomena yang terjadi secara alamiah serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi, pengalaman, dan kendala yang dihadapi oleh pelaku pendidikan dalam melaksanakan administrasi kurikulum. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan melalui pengumpulan data pada kondisi yang alami.

Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru yang terlibat secara langsung dalam implementasi Pembelajaran Merdeka. Ketiga subjek tersebut dipilih karena memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi administrasi kurikulum di sekolah. Sementara itu, objek penelitian difokuskan pada praktik administrasi kurikulum yang meliputi penyusunan perangkat pembelajaran, pengelolaan administrasi pembelajaran, pelaksanaan asesmen, dokumentasi kegiatan pembelajaran, serta berbagai tantangan yang muncul selama implementasi Pembelajaran Merdeka.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, kendala, serta strategi yang diterapkan dalam mengelola administrasi kurikulum. Observasi dilakukan terhadap aktivitas administrasi pembelajaran di sekolah guna memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan administrasi kurikulum, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, seperti modul ajar, perangkat pembelajaran, dokumen asesmen, kalender pendidikan, program semester, serta dokumen administrasi lain yang berkaitan dengan implementasi Pembelajaran Merdeka.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih serta mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap seluruh data yang telah dianalisis sehingga diperoleh gambaran mengenai tantangan administrasi kurikulum dalam implementasi Pembelajaran Merdeka.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan kembali terhadap hasil analisis agar interpretasi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi administrasi kurikulum dalam Pembelajaran Merdeka masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep dan kebijakan Pembelajaran Merdeka, meningkatnya beban administrasi pembelajaran, belum optimalnya sistem administrasi sekolah dalam mendukung fleksibilitas kurikulum, serta keterbatasan pelatihan dan pendampingan bagi tenaga pendidik.

Keterbatasan pemahaman guru terlihat dari masih adanya kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran, seperti modul ajar, alur tujuan pembelajaran, asesmen diagnostik, serta pelaporan hasil belajar yang disesuaikan dengan karakteristik Kurikulum Merdeka. Perbedaan tingkat pemahaman antarpendidik menyebabkan implementasi administrasi kurikulum belum berjalan secara seragam di setiap satuan pendidikan.

Selain itu, guru juga menghadapi peningkatan beban administrasi sebagai konsekuensi dari perubahan sistem pembelajaran. Penyusunan berbagai dokumen pembelajaran, pelaksanaan asesmen yang berkelanjutan, dokumentasi perkembangan peserta didik, serta pelaporan capaian pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup besar. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian guru mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara pelaksanaan pembelajaran dengan penyelesaian tugas-tugas administratif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem administrasi sekolah belum sepenuhnya mampu mendukung implementasi Pembelajaran Merdeka secara optimal. Beberapa sekolah masih menggunakan sistem administrasi yang bersifat konvensional sehingga proses pengelolaan dokumen kurikulum, penyimpanan data asesmen, serta pelaporan hasil belajar belum dilakukan secara terintegrasi. Di samping itu, keterbatasan pelatihan dan pendampingan menyebabkan guru harus beradaptasi secara mandiri terhadap berbagai perubahan administrasi yang terjadi.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan administrasi kurikulum dalam implementasi Pembelajaran Merdeka. Guru sebagai pelaksana utama pembelajaran dituntut tidak hanya memahami substansi kurikulum, tetapi juga mampu mengelola administrasi pembelajaran secara efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Hamalik (2018) yang menyatakan bahwa administrasi kurikulum merupakan proses pengelolaan seluruh komponen kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Apabila tenaga pendidik belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap perubahan kurikulum, maka proses administrasi maupun pelaksanaan pembelajaran akan mengalami berbagai kendala.

Peningkatan beban administrasi yang dialami guru menunjukkan bahwa implementasi Pembelajaran Merdeka masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek tata kelola administrasi. Walaupun Kurikulum Merdeka mengedepankan fleksibilitas pembelajaran, guru tetap harus menyusun berbagai perangkat administrasi sebagai bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kondisi ini mendukung pendapat Mulyasa (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam mengelola administrasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penyederhanaan administrasi pembelajaran perlu dilakukan tanpa mengurangi kualitas dokumentasi proses pembelajaran.

Belum optimalnya sistem administrasi sekolah menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung implementasi Pembelajaran Merdeka. Sistem administrasi berbasis digital dapat membantu guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, mendokumentasikan hasil asesmen, mengelola data peserta didik, serta menyusun laporan pembelajaran secara lebih cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan administrasi, serta mempermudah koordinasi antara guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesiapan guru menghadapi perubahan kebijakan kurikulum. Guru yang memperoleh pelatihan secara berkelanjutan cenderung lebih mudah memahami penyusunan perangkat ajar, pelaksanaan asesmen, serta pengelolaan administrasi kurikulum sesuai karakteristik Pembelajaran Merdeka. Hasil ini sejalan dengan Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek (2022), yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas pendidik melalui komunitas belajar, pelatihan, dan pendampingan agar implementasi kurikulum dapat berlangsung secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi kurikulum dalam implementasi Pembelajaran Merdeka dipengaruhi oleh keterpaduan antara kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem administrasi, dukungan teknologi informasi, serta komitmen manajemen sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu membangun sistem administrasi yang lebih adaptif, sederhana, dan berbasis digital, disertai peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan demikian, administrasi kurikulum tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai instrumen strategis yang mendukung terciptanya pembelajaran yang berkualitas, inovatif, dan berpusat pada peserta didik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Pembelajaran Merdeka di satuan pendidikan. Efektivitas administrasi kurikulum dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam mengelola proses perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, pengawasan, dan evaluasi pembelajaran secara sistematis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi sekolah meliputi keterbatasan pemahaman guru terhadap kebijakan Pembelajaran Merdeka, meningkatnya beban administrasi pembelajaran, belum optimalnya sistem administrasi sekolah, serta terbatasnya pelatihan dan pendampingan dalam implementasi kurikulum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Pembelajaran Merdeka tidak hanya ditentukan oleh perubahan kurikulum, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, efektivitas sistem administrasi, dukungan teknologi informasi, serta kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola perubahan. Administrasi kurikulum yang adaptif dan terorganisasi dengan baik mampu mendukung penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan asesmen, pengelolaan dokumen akademik, serta proses evaluasi pembelajaran secara lebih efektif sehingga tujuan Pembelajaran Merdeka dapat tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, sekolah perlu memperkuat sistem administrasi kurikulum melalui penyederhanaan proses administrasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen pembelajaran, serta

peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan dalam bentuk kebijakan, penyediaan fasilitas, serta pengembangan sistem administrasi yang lebih terintegrasi agar implementasi Pembelajaran Merdeka dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan ruang lingkup yang terbatas pada analisis tantangan administrasi kurikulum. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak satuan pendidikan dari berbagai jenjang dan wilayah, serta menggunakan pendekatan mixed methods agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas administrasi kurikulum dalam implementasi Pembelajaran Merdeka. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan administrasi kurikulum yang lebih adaptif terhadap dinamika perubahan pendidikan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para penulis jurnal, buku, dan sumber ilmiah lainnya yang menjadi rujukan utama, sehingga memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat dalam pembahasan penelitian ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri atas komitmen, ketekunan, dan konsistensi dalam menyelesaikan proses penelusuran literatur, analisis data, serta penyusunan artikel ini hingga selesai.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dalam Perspektif Manajemen Pendidikan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arikunto, S. (2013). Manajemen Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamalik, O. (2018). Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kemendikbudristek. (2022). Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2021). Implementasi Kurikulum dalam Satuan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2020). Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Uno, H. B. (2020). Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hastasasi, W., Harjatanaya, T. Y., Kristiani, A. D., Herutami, I., & Andiarti, A. (2022). Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kemendikbudristek.